

PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT TRANSFORMASI SOSIAL

Asryani¹, Gisca², Santi³, Maulfira Magda Pratiwi⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Haluoleo

1asrianajah1@gmail.com, 2giscaahdad@gmail.com, 3santyy776@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the role of the Dutch Ethical Policy in shaping national consciousness and the emergence of an indigenous intellectual elite who became agents of change in the struggle for Indonesian independence. The research employs a qualitative method with a historical approach, analyzing historical documents, colonial archives, and relevant literature. The findings reveal that although the Ethical Policy was intended to serve colonial interests, it inadvertently provided opportunities for education and increased social awareness among the indigenous elite. These individuals became key drivers of social transformation, fostering resistance against colonial rule and advocating for independence through organizations, education, and the media. This study concludes that colonial education served as a crucial instrument for social change and the development of Indonesian nationalism, with the indigenous intellectual elite playing a central role in the independence movement.

Keywords: *education, indigenous schools (HIS, MULO, STOVIA, Kweekschool), social transformation*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kebijakan Politik Etis Belanda dalam membentuk kesadaran nasional dan kemunculan elit intelektual pribumi yang menjadi agen perubahan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis, melalui analisis dokumen sejarah, arsip kolonial, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Politik Etis, meskipun bertujuan mendukung kepentingan kolonial, secara tidak langsung membuka ruang bagi pendidikan dan kesadaran sosial yang tinggi di kalangan elit pribumi. Mereka kemudian menjadi penggerak utama transformasi sosial, membentuk perlawanan terhadap penjajahan, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi, pendidikan, dan media. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan kolonial menjadi instrumen penting bagi perubahan sosial dan pembentukan nasionalisme Indonesia, dengan elit intelektual pribumi sebagai agen utama dalam perjuangan kemerdekaan.

Kata Kunci : *pendidikan, sekolah pribumi (HIS, MULO, STOVIA, Kweekschool), transformasi sosial*

A. Pendahuluan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan kolonial Belanda, khususnya penerapan Politik Etis pada awal abad ke-20. Politik Etis, atau *Ethische Politiek*, merupakan perubahan orientasi dari sistem kolonial yang semula bersifat eksploitatif menuju pendekatan yang lebih "humanis", walaupun tetap berada dalam kerangka kolonialisme (Ricklefs, 2008). Gagasan ini secara formal diperkenalkan oleh tokoh etis Belanda, C.Th. van Deventer, melalui tulisannya *Een Eereschuld* (1901), yang mengemukakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan terhadap rakyat Hindia Belanda karena eksploitasi berlebihan selama tanam paksa (Vlekke, 2008).

Salah satu aspek terpenting dari Politik Etis adalah perluasan akses pendidikan bagi pribumi. Pendidikan dianggap sebagai instrumen "pembinaan" rakyat jajahan agar dapat menjadi tenaga terampil dalam struktur kolonial. Namun, pendidikan ini justru membuka ruang baru bagi munculnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan pribumi terpelajar (Kartodirdjo, 1993). Dalam

institusi pendidikan seperti *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, *School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)*, dan *Kweekschool*, generasi muda Indonesia mulai tidak hanya mengenal baca-tulis, tetapi juga berkenalan dengan ide-ide Barat seperti rasionalitas, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Anderson, 2006).

Menurut penelitian Shiraishi (1990), pendidikan kolonial tidak hanya mencetak tenaga kerja intelektual, melainkan juga menciptakan ruang baru bagi terbentuknya identitas nasional di kalangan pelajar dan pemuda Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantara, dan Tan Malaka adalah representasi dari generasi terdidik kolonial yang kemudian berbalik arah menentang sistem penjajahan, membentuk organisasi-organisasi nasionalis, dan mengartikulasikan mengenai gagasan kebangsaan.

Kemunculan kaum terpelajar ini menggeser struktur sosial kolonial yang sebelumnya sangat feodal dan tertutup. Pendidikan menciptakan peluang mobilitas sosial vertikal serta membentuk kelas menengah baru

yang berpikir kritis terhadap ketidakadilan kolonial (Tsuchiya, 1987). Mereka menjadi aktor utama dalam pergerakan nasional, yang puncaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Politik Etis meskipun lahir dari kepentingan kolonial secara paradoks justru memfasilitasi lahirnya kekuatan perlawanan intelektual terhadap kolonialisme. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana pendidikan kolonial berperan sebagai instrumen transformasi sosial dan politik, serta sebagai landasan terbentuknya kesadaran nasional yang membawa bangsa Indonesia ke pintu kemerdekaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan berbasis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menelusuri dan merekonstruksi proses historis yang menghubungkan penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda dengan munculnya kesadaran

nasionalisme Indonesia melalui jalur pendidikan. Pendekatan historis memungkinkan peneliti untuk mengkaji dinamika masa lalu secara kronologis, memahami pengaruhnya terhadap transformasi sosial-politik bangsa Indonesia. Sementara itu, pendekatan kepustakaan digunakan karena seluruh data dan informasi dalam penelitian ini bersumber dari literatur tertulis yang relevan dan telah dipublikasikan secara akademis.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber data meliputi dokumen sejarah, arsip kolonial, peraturan pendidikan masa Hindia Belanda, tulisan dan pidato tokoh-tokoh pergerakan nasional, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, disertasi, serta biografi tokoh. Sumber tersebut diambil dari perpustakaan kampus, Perpustakaan Nasional RI, serta platform ilmiah digital seperti Google Scholar, ResearchGate, JSTOR, dan situs resmi lembaga arsip seperti KITLV.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang sistematis. Peneliti terlebih dahulu

menelusuri sumber dengan menggunakan kata kunci seperti “Politik Etis,” “pendidikan kolonial,” dan “nasionalisme Indonesia awal abad ke-20.” Setelah menemukan sumber yang relevan, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang kredibel dan memiliki bobot akademis yang diakui. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau periode waktu dan dianalisis secara mendalam. Untuk itu, seluruh catatan penting dari sumber yang telah dipilih didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk kutipan langsung maupun ringkasan isi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis, yaitu dengan menyusun uraian peristiwa secara kronologis sekaligus mengkaji dampaknya secara kritis terhadap perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Peneliti tidak hanya menggambarkan bagaimana kebijakan Politik Etis menciptakan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, tetapi juga menganalisis bagaimana sistem pendidikan tersebut yang semula dimaksudkan untuk mendukung kepentingan kolonial justru menghasilkan golongan terdidik yang menjadi motor utama

pergerakan nasional. Dalam menganalisis hubungan sebab-akibat ini, peneliti tetap mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik serta menyadari bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi munculnya kesadaran nasional; faktor ekonomi, agama, dan pengaruh global juga turut berperan.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, peneliti melakukan validasi dengan menerapkan kritik internal dan eksternal terhadap sumber-sumber yang digunakan. Kritik internal dilakukan dengan menilai konsistensi logis dan keutuhan argumen dalam setiap sumber, serta menghindari penarikan kesimpulan yang terlalu menyederhanakan hubungan Politik Etis nasionalisme. Sementara itu, kritik eksternal digunakan untuk menelaah konteks sosial-politik di luar teks sumber, latar belakang penulis, waktu penulisan, dan potensi bias ideologis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Akses Pendidikan dan Terbentuknya Kesadaran Kritis di Era Politik Etis

Kebijakan Politik Etis yang diluncurkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20

merupakan respons terhadap kritik humanis dan tekanan dari dalam negeri Belanda atas praktik kolonial yang dianggap eksploitatif. Prinsip utama dari kebijakan ini mencakup tiga bidang: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dari ketiga aspek tersebut, bidang pendidikan menjadi salah satu instrumen paling signifikan karena berkontribusi langsung terhadap pembentukan kesadaran baru di kalangan masyarakat pribumi. Tujuan awal pendidikan kolonial adalah untuk menciptakan tenaga kerja administratif yang loyal kepada pemerintah kolonial, namun secara tidak terduga pendidikan ini justru menumbuhkan benih kesadaran sosial dan nasionalisme (Ricklefs, 2008).

Berbagai institusi pendidikan didirikan untuk mendukung tujuan tersebut, seperti *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* untuk pendidikan dasar, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* dan *Hoogere Burger School (HBS)* untuk tingkat menengah, serta *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)* yang mendidik calon dokter pribumi. Selain itu, terdapat pula *Kweekschool* yang mencetak guru-guru dari kalangan pribumi. Meskipun

hanya kalangan terbatas seperti kaum priyayi dan anak pegawai kolonial yang dapat mengakses sekolah-sekolah ini, keberadaan institusi-institusi tersebut tetap melahirkan sekelompok elite intelektual yang berbeda dari lapisan masyarakat pribumi lainnya (Lombard, 1996; Vickers, 2005).

Pendidikan kolonial menjadi pintu gerbang bagi anak-anak pribumi untuk mengenal bahasa Belanda, ilmu pengetahuan modern, serta ideologi Barat seperti liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Namun, pendidikan ini juga memperkenalkan mereka pada kontradiksi yang mencolok antara nilai-nilai kebebasan yang diajarkan di kelas dan praktik ketidakadilan dalam kehidupan nyata di bawah sistem kolonial. Para pelajar pribumi mulai memproses dan menafsirkan ulang pelajaran-pelajaran tersebut dalam konteks lokal, sehingga memunculkan kesadaran kritis akan posisi mereka sebagai bangsa yang terjajah. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong munculnya organisasi-organisasi nasionalis awal seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912) (Darmaputera, 1988; Kahin, 1952). Secara sosiologis, pendidikan

kolonial telah menciptakan kelas sosial baru di tengah masyarakat Hindia Belanda, yaitu kelas menengah terdidik. Kelas ini menempati posisi yang kontradiktif (Erik Olin Wright) karena tidak sepenuhnya pro-kolonial, tetapi juga tidak lagi memiliki keterikatan penuh dengan kaum tani dan buruh. Dalam posisi ini, mereka memainkan peran penting sebagai jembatan antara massa rakyat dan gagasan-gagasan modern yang kelak menjadi fondasi pergerakan nasional. Pendidikan kolonial, yang awalnya dirancang sebagai alat hegemoni untuk menanamkan nilai-nilai Barat dan mendukung dominasi penguasa (Antonio Gramsci), justru menjadi alat pembebasan sosial di tangan para intelektual pribumi.

Tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bagaimana pendidikan membentuk individu-individu yang memiliki kesadaran nasional, serta komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, mereka memanfaatkan modal budaya yang diperoleh dari sistem pendidikan kolonial untuk melawan struktur dominasi sosial yang menindas. Sebagai intelektual organik (Gramsci),

mereka tidak hanya mengadopsi pengetahuan Barat, tetapi juga menafsirkan dan merekonstruksi pengetahuan tersebut dalam konteks perjuangan lokal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Mannheim, kelas intelektual memiliki potensi mentransformasikan masyarakat melalui gagasan, dan dalam konteks Hindia Belanda, mereka berperan dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa. Bahkan dari sudut pandang teori modernisasi (Daniel Lerner), pendidikan kolonial, meskipun bersifat elitis, turut memperkenalkan nilai-nilai seperti rasionalisme, nasionalisme, dan emansipasi, yang menjadi bahan bakar ideologis bagi gerakan kemerdekaan. Dengan demikian, pendidikan kolonial bukan hanya alat penaklukan, tetapi juga secara paradoks menjadi ladang lahirnya perlawanan intelektual.

b. Pendidikan sebagai alat transformasi sosial

Pendidikan kolonial di Hindia Belanda awalnya dirancang sebagai alat kekuasaan untuk mencetak elite birokrat pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial. Namun akses terhadap pendidikan ini sangat terbatas dan diskriminatif hanya anak-

anak dari kalangan bangsawan (priyayi) yang diperbolehkan mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena mereka dianggap lebih “beradab”, lebih mudah dikendalikan, dan secara status sosial cocok dijadikan perantara kekuasaan antara pemerintah kolonial dan rakyat biasa (Shiraishi, 1997). Sebaliknya, rakyat jelata seperti petani dan buruh dianggap tidak memerlukan pendidikan karena hanya diposisikan sebagai tenaga kerja kasar. Kebijakan ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan kolonial yang dilembagakan melalui sistem pendidikan (Kartodirdjo, 1987).

Namun secara paradoks, kebijakan yang bersifat eksklusif ini justru melahirkan kelas menengah terdidik pribumi yang mulai membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan kolonial. Mereka mengalami mobilitas sosial vertikal, yakni pergerakan dari lapisan bawah ke posisi sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan. Mobilitas ini bukan hanya berupa peningkatan status ekonomi dan jabatan dalam birokrasi kolonial, tetapi juga perubahan dalam hal modal budaya dan kekuasaan simbolik yang memungkinkan mereka berperan aktif

dalam perjuangan kemerdekaan (Bourdieu & Passeron, 1990; Wright, 1997).

Dalam kerangka teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, pendidikan biasanya berfungsi untuk melanggengkan struktur sosial dominan dengan mereproduksi habitus dan modal budaya. Namun, dalam konteks Hindia Belanda, modal budaya yang diperoleh kelompok terdidik ini justru dimanfaatkan untuk menggugat sistem kolonial dan menyuarakan ide-ide pembebasan nasional.

Menurut Antonio Gramsci, pendidikan adalah arena hegemoni di mana kelas dominan menanamkan ideologinya lewat lembaga sosial seperti sekolah. Akan tetapi, munculnya intelektual organik dari kalangan terdidik pribumi — seperti Ki Hajar Dewantara, Soetomo, dan Tjipto Mangoenkoesoemo — menunjukkan bahwa pendidikan juga dapat menjadi alat perlawanan ideologis dan pembangkitan kesadaran kolektif (Gramsci, 1971). Hal ini sejalan dengan pandangan Karl Mannheim yang menekankan peran intelektual sebagai agen perubahan sosial yang mentransformasi masyarakat melalui ide-ide progresif (Mannheim, 1936).

Posisi kelas menengah pribumi ini juga menggambarkan kelas kontradiktif, sebagaimana dijelaskan oleh Erik Olin Wright: mereka tidak sepenuhnya termasuk dalam kelas penguasa, namun juga bukan bagian dari kelas tertindas. Posisi ini memberi mereka kemampuan untuk menjadi jembatan antara struktur kolonial dan aspirasi rakyat (Wright, 1997). Dengan demikian, pendidikan kolonial meskipun elitis dan tidak setara membuka ruang bagi transformasi sosial, menciptakan lapisan sosial baru yang berperan strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

D. Kesimpulan

Daftar Kebijakan Politik Etis, khususnya dalam bidang pendidikan, memainkan peran yang sangat penting dalam proses transformasi sosial dan munculnya kesadaran nasional di Hindia Belanda. Meskipun pada awalnya dirancang sebagai strategi kolonial untuk mencetak birokrat pribumi yang loyal kepada pemerintahan Belanda, pendidikan kolonial justru menghasilkan efek yang tidak terduga: lahirnya kelas menengah terdidik yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme Indonesia. Pendidikan telah menjadi

medium kontradiktif yang di satu sisi memperkenalkan nilai-nilai Barat seperti rasionalisme, keadilan, dan kebebasan, namun di sisi lain memperlihatkan secara nyata ketimpangan dan ketidakadilan dalam praktik kolonial. Dari sinilah tumbuh kesadaran kritis di kalangan pelajar pribumi, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh intelektual seperti Soetomo, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Mereka menjadi intelektual organik yang tidak hanya menyuarakan gagasan pembebasan, tetapi juga mengartikulasikan identitas kebangsaan Indonesia. Dalam perspektif teori sosiologis dan pendidikan kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak semata-mata berfungsi sebagai alat reproduksi ideologi penguasa, tetapi juga sebagai ruang resistensi dan emansipasi. Pendidikan kolonial, meskipun terbatas dan elitis, membuka jalur mobilitas sosial dan membentuk habitus baru di kalangan masyarakat pribumi yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan. Pendidikan dalam kerangka Politik Etis tidak bisa dilihat secara simplistik sebagai alat kolonial semata. Ia juga merupakan

katalis bagi proses lahirnya kesadaran nasional dan gerakan kemerdekaan. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika sejarah secara kritis dan kontekstual, serta menggali peran pendidikan sebagai kekuatan transformatif dalam membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S., Parluhutan, D., & Sabela, L. S. (2024). Politik Etis Dan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia. *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum Dan Praktik Hukum Di Indonesia*, 33.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction In Education, Society And Culture* (2nd Ed.). London: Sage Publications.
- Datungsolang, R. (2018). Konsep Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Paulo Freire). *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(1), 49-77.
- Gramsci, A. (1971). *Selections From The Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism And Revolution In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900* (Vol. 2). Jakarta: Gramedia.
- Kusumawardani, A., & Faturochman, M. A. (2004). *Nasionalisme*. *Buletin Psikologi*, 12(2).
- Lerner, D. (1958). *The Passing Of Traditional Society: Modernizing The Middle East*. New York: Free Press.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Volume li*. Jakarta: Gramedia.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24-40.
- Yusuf, Y. (2024). Pendidikan Yang Memerdekakan: Persepektif Freire Dan Ki Hajar Dewantara. *Peradaban Journal Of Interdisciplinary Educational Research*, 2(2), 55-72.